

**Internasional Symposium SPS-WTO
Mentan dan HB X Kunjungi Stand Barantan
Bebas Rabies ala Jepang**



Departemen Pertanian
BADAN KARANTINA PERTANIAN



Badan Karantina Pertanian
DEPARTEMEN PERTANIAN

Pusat Karantina Tumbuhan

CEGAH TANGKAL

HAMA TUMBUHAN

DARI KEMASAN KAYU IMPOR

MASUK KE INDONESIA



Daftar Isi

JANGAN DIBAWA
PULANG
MILIK B.U.T



3 Quarantama

Hari Pangan Sedunia merupakan peringatan yang dilakukan oleh seluruh negara yang tergabung dalam organisasi dunia secara serentak pada tanggal 16 November 2009. Indonesia menggelar even ini di Pelataran Candi Prambanan, Yogyakarta pada tanggal 12 - 15 November 2009.

6 Opini



Pojok Karantina

9



19

Menulis di Quaranta

Tgl. Terbit

No. Induk 1607/m/pbk/ii/2013

Asal

Beli/Tukar/Hadiah

Daftar

REDAKSI

PELINDUNG

Kepala Badan Karantina Pertanian

PENGARAH

Sekretaris Badan Karantina Pertanian
Kepala Pusat Karantina Tumbuhan
Kepala Pusat Karantina Hewan
Kepala Pusat Informasi dan
Keamanan Hayati

PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB

Kepala Bagian Kerjasama & Humas

REDAKTUR PELAKSANA

Kepala Sub Bagian Humas

SIDANG REDAKSI

Koordinator Fungsional
Karantina Tumbuhan
Koordinator Fungsional
Karantina Hewan
Endah Kartikawati

DOKUMENTASI

Hendri

SIRKULASI

FX Martin Avena S.Sos

KEUANGAN & ADMINISTRASI

Sumaryanti, SE

ALAMAT REDAKSI

Kampus Deptan Ged.E
Jl. Harsono RM No 3
Jakarta 12550

Telp. 021-7816480

Fax 021-7816486

Website

www.karantina.deptan.go.id

Cover

Hama Buah Anastrepha ludens

E-mail

humaskarantina@deptan.go.id

Edisi kali ini Buletin Media Quaranta menghadirkan rubrikasi baru, TELUSUR. Rubrik ini berisikan kajian seputar penanggulangan wabah hama penyakit hewan tumbuhan baik dari dalam negeri dan luar negeri. Pada terbitan ini artikel berbagai negara dalam menanggulangi penyakit hewan yakni Sapi Gila di Irlandia, dan Rabies di Jepang. Kajian disampaikan dalam format populer sehingga dapat mudah dan nyaman dibaca.

Kedepan diharapkan partisipasi pembaca dalam berbagi pengalaman, informasi dan pengetahuan dalam penanggulangan hama penyakit hewan dan tumbuhan. Semoga ini dapat memberi sumbangan informasi bagi upaya perlindungan kekayaan alam hayati Indonesia, amien.

Salam,

Redaksi

Selamat & Siap Mendukung

Ir. Suswono MMA
Sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia

&

Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi
Sebagai Wakil Menteri Pertanian

Periode : 2009 – 2014

Keluarga Besar Badan Karantina Pertanian

**4 Program Capaian Sukses
Departemen Pertanian (2009 – 2014)**

1. Sukses Swa Sembada Berkelanjutan
2. Sukses Diversifikasi Pangan
3. Sukses Peningkatan Nilai Tambah,
Daya Saing dan Ekspor
4. Sukses Peningkatan Kesejahteraan Petani



Ir. Suswono MMA



Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi

HARI PANGAN SEDUNIA XXIX/2009 : KEAMANAN PANGAN DI MASA KRISIS GLOBAL

Jogyakarta – Puncak Peringatan Hari Pangan Sedunia ke-29 pada tahun 2009 diselenggarakan di Komplek Candi Prambanan, Yogyakarta pada tanggal 12 Oktober 2009.

Peringatan ini dilakukan oleh seluruh negara yang tergabung dalam organisasi dunia PBB secara serentak pada setiap tanggal 16 Oktober. Hari Pangan sedunia (HPS) diperingati setiap tanggal 16 Oktober. Tanggal tersebut sama dengan tanggal berdirinya Food and Agriculture Organization (FAO). Pada saat Food and Agriculture Organization Conference (Konferensi FAO) ke 20 yang dilaksanakan bulan Nopember 1979 di Roma Italia, 147 negara anggota FAO termasuk Indonesia telah menyepakati diterbitkannya Resolusi No.1/79 mengenai World Food Day. Dalam resolusi tersebut ditetapkan mulai tahun 1981 seluruh Negara anggota FAO sepakat untuk memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS) setiap tanggal 16 Oktober.

Adapun tema dunia pada tahun ini adalah "Achieving Food Security in Time of Crisis". Untuk di Indonesia, Departemen Pertanian dipercaya untuk menjadi koordinator pada peringatan ini dan tema yang di pilih sejalan dengan tema dunia, yakni : "Memantapkan Ketahanan Pangan Nasional Mengantisipasi Krisis Global".

Peringatan hari pangan di Indonesia bertujuan menumbuhkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat terhadap potensi sumber daya alam serta tantangannya untuk mewujudkan

ketahanan pangan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam menyikapi masalah ketahanan pangan baik tingkat nasional, global maupun regional serta memperkokoh solidaritas antar bangsa dalam usaha memberantas kekurangan pangan dan gizi yang masih dialami oleh sebagian penduduk dunia terutama di negara berkembang.

Peringatan Hari Pangan Sedunia XXIX ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai wahana pertemuan pengusaha dan kelompok usaha dalam mengembangkan pengolahan pangan lokal dan pemasarannya, menggerakkan penyelenggaraan pangan yang berkelanjutan dengan menumbuhkan peran masing masing pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah (pemda), swasta, lembaga swadaya

masyarakat, perusahaan dan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, serta sekaligus membangun sinergi, antar berbagai lembaga dan pemangku kepentingan tersebut.

Indonesia memiliki potensi dan peluang untuk meningkatkan ketahanan pangan seperti mega biodiversitas untuk meningkatkan produktifitas dan keanekaragaman pangan, lahan kering dan marginal yang masih luas dan belum termanfaatkan untuk produksi pangan, pesisir dan pantai terpanjang didunia yang dapat dimanfaatkan untuk produksi perikanan, pemanfaatan areal hutan untuk produksi pangan dan keragaman komoditas pangan lokal yang dapat dikembangkan sebagai pangan masa depan.

Sektor pertanian pangan memiliki potensi besar dalam penyediaan sumber karbohidrat dari biji-bijian dan protein dari hasil ternak. Sektor perikanan dengan sumber daya perikanan tangkap dan budidaya yang relatif besar mampu memberikan pasokan sumber protein ikan berkualitas tinggi dengan tingkat



harga yang terjangkau. Sektor kehutanan di samping sebagai pendukung sektor pertanian dengan pasokan air secara berkelanjutan melalui fungsinya sebagai pengatur tata air, habitat berkembang biak perikanan, juga secara langsung mendukung produksi pangan melalui sistem tumpang sari, serta sebagai cadangan pangan pada kondisi darurat (*food reserve at the last resort*).

Rangkaian Kegiatan Hari Pangan Sedunia

Seminar

Pada tanggal 1 Oktober 2009, bertempat di Gedung Manggala Wanabakti, Departemen Kehutanan, Jakarta telah diselenggarakan Seminar Nasional Hari Pangan Sedunia 2009 oleh Departemen Kehutanan bekerjasama dengan Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Negara Riset dan Teknologi.

Seminar ini dihadiri para pihak dari keempat sektor tersebut yang terdiri atas unsur akademisi, birokrat, pelaku usaha, asosiasi, LSM, kelompok tani dan kelompok masyarakat lainnya. Hasil dari seminar ini akan diserahkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia pada saat puncak Peringatan Hari Pangan Sedunia di Yogyakarta tanggal 12 Oktober 2009.

Materi yang akan dipaparkan dan dibahas dalam seminar ini adalah :

1. Pangan dari Hutan (Kontribusi Sektor Kehutanan dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional) (Departemen Kehutanan)
2. Diversifikasi sebagai Salah Satu Pilar Ketahanan Pangan (Departemen Pertanian)
3. Pangan dari Ikan : Kondisi Sekarang dan Prediksi ke Depan

(Departemen Kelautan dan Perikanan)

4. Kontribusi Teknologi dalam Pencapaian Ketahanan Pangan (Kementerian Negara Riset dan Teknologi)

Pameran

Bekerjasama dengan Masyarakat Agribisnis dan Agriindustri Indonesia (MAI), pada puncak peringatan ini diselenggarakan pameran. Indonesia Food Expo berlangsung pada tanggal 12 hingga 15 Oktober 2009. Produk-produk yang dipamerkan antara lain program-program pengelolaan serta perkembangan dunia pertanian, perikanan dan kelautan, dan kehutanan ; peran perusahaan dalam penanganan pangan; *brand image* produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan; komoditas pertanian unggulan; makanan dan minuman olahan berbasis pangan lokal; teknologi peralatan; agro products, dan food&beverages.

Partisipasi Badan Karantina Pertanian

Sebagai salah satu unit kerja Eselon 1 dibawah Departemen Pertanian,

Badan Karantina Pertanian juga turut berpartisipasi pada kegiatan ini. 3 UPT masing-masing Cilacap, Semarang dan Yogyakarta bersama dengan Sub Bagian Humas menampilkan 2 (dua) stand display layanan publik perkarantinaaan.

Tatapan display dan petugas yang sigap menjelaskan prosedur perkarantinaaan menarik bagi pengunjung pameran. Menteri Pertanian, Bapak Ir. Anton Apriyantono dan Gubernur DIY, Sultan Hamengkubowono X berkesempatan mendapatkan penjelasan mengenai Tata Alur Karantina Pertanian untuk Ekspor buah salak pondoh ke China. Sementara itu ular jenis phyton pada Klinik Layanan Kesehatan Hewan banyak menarik perhatian. Pengunjung dapat saja sekedar mengambil gambar berlatar belakang ular maupun berkonsultasi.

Kedepan, kegiatan pameran yang merupakan sarana promosi dan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat ini lebih dapat ditingkatkan baik dari sisi pengemasan maupun materi pameran. (ADK/CAS)



Internasional Symposium SPS-WTO:

MENEROBOS PASAR GLOBAL TERAPKAN ATURAN SPS



Jakarta, 6 Oktober 2009 – Perjanjian SPS (Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures) merupakan salah satu perjanjian diantara berbagai perjanjian yang ditandatangani dalam rangka Putaran Uruguay yang diantaranya juga menyepakati dibentuknya World Trade Organization (WTO) pada tanggal 1 Januari 1995. Perjanjian SPS mengatur standar keamanan pangan terkait dengan kesehatan hewan, bahan asal hewan, tumbuhan dan produk olahannya.

Badan Karantina Pertanian selaku National Enquiry Point untuk SPS di Indonesia dari tanggal 6 – 8 Oktober 2009 berinisiatif untuk menyelenggarakan International Symposium. Pembicara pada kegiatan ini adalah delegasi dari organisasi perdagangan dunia, WTO, wakil dari negara sahabat dan pembicara dari

instansi terkait didalam negeri. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk tukar menukar ide terkait dengan standar, guidelines dan rekomendasi termasuk metode pemeriksaan produk secara ilmiah serta mendiskusikan SPS yang menghambat perdagangan bilateral, regional dan multilateral saat ini.

Simposium yang dihadiri oleh para pengambil kebijakan, pembuat peraturan, ilmuwan, akademisi, manajer perusahaan sektor swasta dan para stake holder karantina pertanian lainnya juga digunakan untuk mengidentifikasi *capacity building* di dalam upaya memperkuat manajemen SPS menyangkut kesehatan hewan dan tumbuhan serta keamanan pangan untuk strategi akses pasar yang lebih baik. Beberapa negara tetangga, yakni

Jepang, Malaysia dan Thailand juga mengirimkan delegasinya untuk turut hadir pada acara ini guna saling tukar menukar pengetahuan serta pengalaman dalam penerapan SPS.

Disamping kegiatan diatas, pada kesempatan ini Badan Karantina Pertanian juga menggelar kegiatan pameran pameran Agri-QuarantineLand Expo 2009. Kegiatan pameran dipandang sangat penting dalam upaya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat luas mengenai isu perkarantinaan khususnya terkait dalam penerapan ketentuan WTO terkait masalah SPS. Sementara bagi dunia usaha agribisnis, kegiatan ini merupakan promosi produk dan jasanya terkait dengan penerapan standar-standar untuk memenuhi keamanan pangan dan kedepan diharapkan dapat menembus pasar perdagangan global. (KR/CAS)

MAKAN AYAM versus DARAH TINGGI

Dunia perunggasan di Indonesia yang berkembang sangat pesat sempat terhantam oleh kasus Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) sejak pertengahan 2003. Sebelum merebaknya HPAI di Indonesia, beberapa integrated poultry industry dalam negeri sempat mengeksport produk unggas ke Negeri Matahari Terbit.

Kini telah bangkit kembali peternakan unggas khususnya ayam ras (broiler dan layer) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi protein hewani. Daging ayam dan telur merupakan sumber protein hewani yang harganya relatif terjangkau masyarakat Indonesia. Disamping itu, daging ayam yang dikategorikan sebagai daging putih aman dikonsumsi bagi beberapa kalangan yang khawatir dengan kadar kolesterolnya. Selaras dengan perubahan pola konsumsi dan pertambahan penduduk di Indonesia, permintaan pasar terhadap daging ayam terus meningkat. Kondisi inilah yang memacu perkembangan peternakan ayam di tanah air.

Sementara di negeri Matahari Terbit, ayam dan telur belakangan ini telah mencuri perhatian masyarakatnya. Ini dikarenakan hasil penelitian yang dipublikasikan pada *Journal of Japan Society for Bioscience Tsukuba* menyebutkan bahwa ceker ayam berkhasiat untuk meredam darah tinggi. Dalam jurnal tersebut dinyatakan bahwa *chicken collagen extract* dari ceker ayam mempunyai aktivitas yang setara dengan obat anti-hipertensi golongan ACE-inhibitor. *Chicken collagen extract* ini bekerja dengan cara menurunkan



kadar renin dalam plasma darah, sehingga tidak memacu kenaikan tekanan darah lebih tinggi lagi.

Selain ceker ayam, telur ayam juga bermanfaat bagi pengidap darah tinggi. Berita ini direlease setelah para ahli dari Universitas Alberta Kanada mengadakan penelitian yang hasilnya juga dipublikasikan melalui *Journal of Japan Society for Bioscience Tsukuba*. Telur ayam yang dimasak ternyata berpotensi setara dengan anti-hipertensi ACE-inhibitor seperti halnya dengan ceker ayam. Tentunya ini merupakan hal ini menambah khasanah upaya meredam darah tinggi melalui diet telur dan ceker ayam. Telur ayam merupakan sumber asam amino yang lengkap bagi kebutuhan metabolisme tubuh untuk tumbuh dan berkembang.

Bilamana kita tidak mengonsumsi telur sama sekali, kebutuhan tubuh akan delapan jenis asam amino esensial tidak terpenuhi. Akibat ketidak-terpenuhinya kebutuhan tersebut dapat menimbulkan keluhan-keluhan bahkan penyakit. Dari hasil penelitian sebelumnya, untuk konsumsi telur yang baik dianjurkan dua-tiga kali seminggu. Menurut data



FAO tahun 2006 konsumsi telur masyarakat Indonesia hanya 67 butir/kap/tahun. Berarti bahwa konsumsi telur ayam masyarakat Indonesia belum tentu seminggu sekali. Ini menunjukkan masih rendahnya konsumsi telur ayam pada masyarakat kita, dan bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand kita kalah jauh. Hal ini perlu mendapat perhatian bersama guna menciptakan kualitas hidup yang lebih baik untuk menuju masyarakat yang madani dalam rangka mendorong pembangunan nasional (disarikan dari berbagai sumber// humaskarantina@deptan.go.id)

BERHENTI MAKAN AYAM
SEBAB

1. Kandungan toksik dan antibiotik yang bahaya
2. Harga yang melampau dan tak masuk akal

Kempen ini dibawakan oleh Sahabat Interaktif Malaysia
SIM 2007
Sempena Menyambut Ramadhan 1428

IRLANDIA BERBENAH UNTUK MEMASARKAN HEWAN DAN PRODUKNYA DI PASAR GLOBAL

Bovine Spongiform Encephalopathy yang kita terjemahkan sebagai penyakit Sapi Gila beberapa waktu silam telah melumpuhkan sektor peternakan Eropa Union.

Namun berkat kerja keras dan sistem penanganan kesehatan hewan yang terintegrasi secara apik dan komprehensif yang dilakukan pemerintah Irlandia telah membuahkan hasil yang menggembirakan. Sudah lima tahun ini Irlandia terhindar dari wabah hama penyakit hewan karantina berkat dukungan dari sistem kesehatan hewan, laboratorium yang handal serta petugas teknis yang profesional.

Kejadian suatu penyakit hewan menular tidak dapat dipastikan, namun dapat diperkirakan dan dihitung berdasarkan analisa risiko penyakit hewan yang kemungkinan dapat terjadi di suatu negara dari kegiatan lalu lintas (importasi) hewan dan produknya di negara tersebut. Analisa risiko penyakit hewan pada dasarnya merupakan suatu metode yang memberikan landasan berfikir rasional untuk pengambilan keputusan dalam menetapkan kebijakan bidang perdagangan hewan dan produk hewan.

Dalam menganalisa risiko penyebaran penyakit, surveillance termasuk rangkaian kegiatan yang tak terpisahkan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi nyata kegiatan internal suatu negara dalam mencegah kejadian penyakit hewan. Penerapan analisa risiko dalam perdagangan hewan dan produknya berkembang sangat pesat seiring dengan kemajuan ilmu epidemiologi, bisnis veteriner, manajemen sistem informasi, statistika terapan. Hal ini logis adanya karena pada dasarnya importasi hewan dan

produknya dalam kerangka perdagangan internasional membawa konsekuensi tingkatan risiko tertentu bagi negara tujuan (importir).

Dalam upaya peningkatan pemasaran hewan dan produk hewan di pasaran internasional, Irlandia berjuang keras untuk menyakinkan pasar terkait keamanan (derajat risiko) komoditasnya. Hal ini wajar dilakukan karena Irlandia merupakan negara anggota Eropa Union yang dunia peternakan ruminansianya sempat terpukul akibat *out break* penyakit *Bovine Spongiform Encephalopathy* (BSE). kejadian tersebut telah membuat mereka mengalami kesulitan dalam memasarkan hewan (ternak ruminansia) dan produknya karena bagi negara-negara bebas penyakit BSE menerapkan pembatasan bahkan pelarangan importasi hewan dan produknya dari negara-negara yang sedang terjangkit atau berstatus tidak bebas penyakit BSE.

Dalam rangka meningkatkan bergening position komoditas pertaniannya khususnya sektor peternakan, Irlandia melalui Departement of Agriculture, Fisheries and Food (DAFF) telah fokus berjuang untuk mengontrol kejadian penyakit BSE. Upaya tersebut dilakukan melalui program Surveillance dan Monitoring BSE, Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan, Implementasi Ketentuan OIE untuk Rumah Potong Hewan berkaitan dengan pengendalian BSE serta Sistem Pengawasan Lalu Lintas Ternak.

Surveillance and Monitoring BSE

Kegiatan Surveillance and Monitoring BSE diatur dalam Animal Health Act 1999 dengan otoritas kompeten dipegang DAFF. Pelaksanaan Surveillance and Monitoring telah dilakukan sesuai

dengan Surveillance Guidelines yang dikeluarkan oleh OIE. Dalam implementasi pengawasannya didukung oleh laboratorium tingkat nasional yang berada di Backweston dan beberapa laboratorium regional dan independen yang diakui dan diawasi oleh DAFF.

Ruang lingkup teknis Surveillance BSE mencakup:

- 1) Surveillance pasif terhadap hewan-hewan yang secara klinis dicurigai
- 2) Pengujian hewan-hewan yang dinyatakan dalam program cohort dan progeny, yaitu hewan-hewan yang dilahirkan pada waktu dan peternakan yang sama
- 3) Pengujian hewan-hewan yang dipotong untuk konsumsi manusia
- 4) Pengujian hewan-hewan yang mati di peternakan



Terkait dengan teknis pengujian laboratorium dilakukan dengan menggunakan metode imunohistokimia, histopatologi dan western blot.

Hasil dari analisa risiko yang dilakukan berdasarkan *recording* hasil laboratorium terhadap pelaksanaan program surveillance dan monitoring BSE sejak Januari 2001 hingga Desember 2008, Irlandia mengeluarkan kebijakan baru dalam hal target pengujian. Perubahan tersebut adalah hewan target pengujian yang semula dilaksanakan terhadap semua hewan sehat di atas umur 30 bulan dan 24 bulan yang menunjukkan minor injuries (casualties) bergeser pada hewan-hewan yang akan dikonsumsi dan berumur diatas 48 bulan. Kebijakan baru ini ditetapkan sejak 1 Januari 2009 dan telah disetujui oleh *Eropean Commission*. Hal yang mendasari kebijakan tersebut adalah *recording surveillance* yang terdeskripsi seperti diagram berikut ini.

Deskripsi uji BSE terhadap hewan yang dicurigai secara klinis

Hasil pengujian sejak tahun 2001 hingga Mei 2009 terhadap 2.196 sampel dengan jumlah kasus positif 322 mempunyai trend penurunan kasus BSE sebesar 91,48%.

Deskripsi uji BSE terhadap hewan yang dinyatakan dalam program Cohort dan Progeny

Hasil pengujian sejak tahun 2001 hingga Mei 2009 terhadap 57.781 sampel dengan jumlah kasus positif 11 mempunyai trend penurunan kasus BSE meskipun ada kenaikan pada tahun 2008 dan turun kembali pada tahun 2009.

Deskripsi uji BSE terhadap hewan yang dipotong untuk dikonsumsi manusia

Hasil pengujian sejak tahun 2001 hingga Mei 2009 terhadap 5.299.819 sampel dengan jumlah kasus positif 146 mempunyai trend penurunan prevalensi BSE sebesar 94,54%.

Deskripsi uji BSE terhadap sampel dari hewan yang mati di peternakan

Hasil pengujian sejak tahun 2001 hingga Mei 2009 terhadap 647.231 sampel dengan jumlah kasus positif 546 mempunyai trend penurunan prevalensi BSE sebesar 97,26%.

Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan

Disamping DAFF fokus pada kegiatan Surveillance dan monitoring, juga memperketat pelaksanaan sistem manajemen keamanan pangan. Pelaksanaan jaminan keamanan pangan diatur dalam *Manual for Hygienic Procedure* yang bersifat wajib untuk dilaksanakan. Penerapannya dilakukan di setiap *Slaughter House and Meat Processor* baik untuk konsumsi domestik maupun untuk ekspor yang pengawasannya dilakukan oleh DAFF. Pengawasan terhadap unit usaha *Slaughter House and Meat Processor* dilaksanakan oleh dua orang dokter hewan pemerintah (veterinary inspector) dan/atau oleh dua orang dokter hewan tidak tetap (temporary veterinary inspector) yang ditunjuk dan diawasi oleh veterinary inspector dan bertanggung jawab kepada pemerintah.

Selain sistem pengawasan pada unit usaha di atas, beberapa kegiatan terkait sistem manajemen keamanan pangan meliputi : 1). Persetujuan unit usaha, 2). Penerimaan hewan hidup, 3). Pemeriksaan antemortem, 4). Pemeriksaan postmortem, 5). Kesejahteraan hewan, 6). Pemeriksaan operasional di unit usaha, 7). Pengambilan sampel, 8). Penanganan produk sampingan (by products), 9). Sertifikasi dan penerimaan karkas di meat processor, 10). Pelabelan dan kemampuan telusur, 11). Audit internal dan 12). Penegakan hukum.

Implementasi Ketentuan OIE untuk Rumah Potong Hewan Terkait BSE

Dalam rangka memudahkan penelusuran balik asal dan status kesehatan hewan yang dilalu lintaskan atau akan dipotong di RPH, setiap ternak harus dilengkapi dengan cattle

identification card dan ear tag yang datanya akan direkam dalam komputer yang tersambung dengan data base DAFF. Selain itu, bagi ternak yang berumur di atas 48 bulan diberi label khusus untuk memudahkan identifikasi dalam rangka pengambilan sampel otak untuk pengujian laboratorium.

Pengujian dalam hal ini rapid test terhadap sampel otak yang dilakukan sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Uropean Union. Beberapa uji cepat yang digunakan antara lain; Enver V2 ELISA, Prionics Check Western Blot dan Prionics Check Priostrip, Idexx Herd Check BSE dan Biorad TeSeE serta Roboscreen Beta Prion BSE Test. Waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil pengujian maksimum 12 jam. Hasil uji inilah yang dijadikan dasar keputusan pelepasan karkas untuk proses dan distribusi selanjutnya. Apabila dalam pemeriksaan tersebut menunjukkan hasil positif BSE, maka seluruh karkas yang positif dan satu karkas sebelum serta dua karkas sesudah karkas positif dimusnahkan. Kebijakan ini diambil guna mencegah terjadinya kontaminasi silang.

Sistem Pengawasan Lalu Lintas Ternak

Dalam hal pengawasan pergerakan/lalu lintas hewan dan produknya, diamanatkan pada veterinary inspector yang bertugas mengawasinya sejak on farm, slaughter house hingga sampai dengan meat processor. Mengenai kelembagaan karantina tidak diatur secara khusus dalam struktur organisasi DAFF. Hal ini dikarenakan tindakan karantina terhadap produk hewan (daging) yang diimpor dilaksanakan di Rotterdam Belanda sebagai pintu pemasukan untuk seluruh Eropean Union, sehingga tidak diperlukan lagi tindakan karantina untuk pemasukan ke Irlandia. Sedangkan yang didistribusikan/diekspor tindakan karantinanya dilakukan oleh veterinary inspector dengan memberikan segel bernomor pada kontainer yang dicantumkan dalam sertifikat kesehatan (disarikan dari berbagai sumber //humaskarantina@deptan.go.id)



Hari Pangan Sedunia 2009





AgriQuarantinelandExpo

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WTO - SPS AGREEMENT

The Strategic Role of SPS Application in Market Access

Jakarta, October 6 - 8, 2009



SymposiumWTO_SPS



Halal Bihalal Keluarga Besar BARANTAN



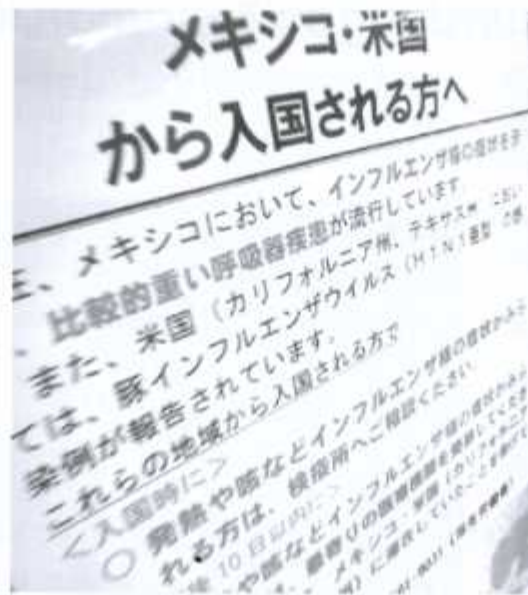
STRATEGI JEPANG PERTAHANKAN BEBAS RABIES

Jepang merupakan salah satu negara yang dinyatakan bebas rabies, bagaimana dengan di Indonesia? Berdasarkan zoning base Indonesia masih mempunyai daerah yang bebas rabies. Bagaimana mempertahankan kondisi bebas ini, tentunya sah-sah saja bilamana kita melihat upaya negeri matahari terbit tersebut untuk kita jadikan bahan referensi dalam eradikasi rabies di negeri tercinta ini. Sudah barang tentu perlu penyesuaian berdasarkan kondisi di Indonesia.

Populasi anjing kesayangan di Jepang sangat besar, menurut data yang dilansir salah satu situs mapsoftworld tahun 2008 saja sudah mencapai 9.650.000 ekor. Tak jarang dari satu keluarga yang memiliki anjing kesayangan lebih dari seekor. Mereka tidak hanya memelihara sebagai hewan kesayangan saja namun sudah menjadikannya anggota keluarga dan bagian dari gaya hidup yang mereka anggap *sophysticated*. Disela-sela kesibukannya mereka menyempatkan diri untuk bermain atau hanya berjalan-jalan dengan anjing kesayangannya di pagi atau petang hari.

Melihat gaya hidup masyarakat negeri matahari yang dekat dengan anjing kesayangan ini, pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan publik terkait Hewan Pembawa Rabies (anjing-red) ini. Kebijakan ini mencakup tindakan bagi HPR yang sudah ada di dalam negeri maupun yang akan dimasukkan ke dalam negeri (Jepang). Kebijakan yang tertuang dalam peraturan ini diambil dengan tujuan untuk melindungi ketentraman masyarakat terhadap serangan penyakit rabies. Meskipun Jepang sebagai negara bebas rabies, namun tetap melaksanakan program vaksinasi rabies.

Dalam peraturan yang diterapkan untuk anjing domestik diwajibkan bagi setiap pemiliknya untuk mendaftarkan sekali dalam seumur hidup anjing dan memvaksin anjingnya dengan vaksin



rabies. Anjing yang berumur lebih dari 90 hari wajib mendapatkan vaksinasi rabies sekali dalam setahun. Vaksinasi rabies digelar serempak antara bulan April dan Juni. Vaksinasi ini digelar selama 5 hari oleh pemerintah daerah. Pemilik anjing akan langsung mendapatkan sertifikat vaksinasi untuk anjingnya pada saat itu pula. Sebagai tambahan gambaran, biaya yang harus disiapkan untuk vaksinasi rabies sebesar 3.000 yen dan untuk mendapatkan sertifikatnya cukup dengan membayar 550 yen.

Sedangkan peraturan untuk importasi anjing dari luar negeri masuk ke Jepang melewati pemeriksaan yang ketat. Dalam undang-undang Pencegahan Rabies di Jepang, menyatakan bahwa setiap anjing, kucing, rubah dan lain-lain yang berpotensi membawa penyakit rabies harus melalui tindakan karantina hewan. Hewan-hewan tersebut akan dimasukkan ke Instalasi Karantina untuk menjalani serangkaian tindakan karantina mulai dari screening test terhadap rabies. Masa karantina terhadap HPR tersebut berbeda-beda tergantung dari asal negara terkait status kesehatannya. Bagi HPR yang berasal dari negara atau wilayah bebas rabies harus menjalani masa karantina selama 12 jam jika HPR tersebut

talah dilengkapi dengan sertifikat kesehatan, identitas dalam microchip ID. Microchip ini ditempatkan (ditanam) di bawah kulit. Disamping itu HPR yang bersangkutan harus telah divaksinasi dengan Vaksin rabies in-active. Berbeda halnya untuk yang berasal dari negara dengan status tidak bebas rabies, HPR akan dikenakan ketentuan masa karantina selama 180 hari.

Menurut salah satu dokter hewan Jepang senior Itoh Osamu, DVM., bahwa ada tiga program penting yang perlu tetap dilaksanakan untuk mempertahankan negara atau wilayah berstatus bebas terhadap penyakit Rabies yaitu : 1) terus melaksanakan pendaftaran / pendataan semua anjing kesayangan; 2) melaksanakan program vaksinasi Rabies secara rutin; dan 3) melaksanakan program pengendalian hewan kesayangan anjing yang tidak bertuan. Memang tampak sederhana tetapi hal ini merupakan tindakan yang sangat penting untuk dilaksanakan. Mari kita bersama-sama mempertahankan daerah bebas Rabies yang kita miliki dan memberantas Rabies pada daerah tertular untuk kesehatan dan kesejahteraan kita bersama (disarikan dari berbagai sumber //humaskarantina@deptan.go.id)

Sidang APPPC ke-26 : Memformulasi Perlindungan Tanaman Karet Terhadap SALB

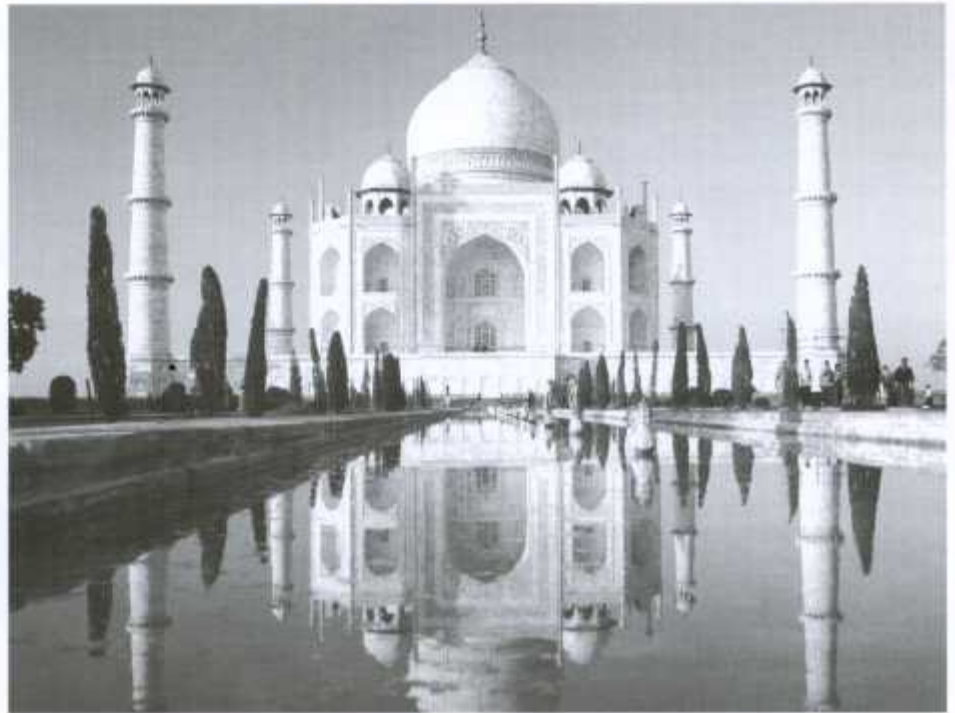
Oleh : Dr. Ir. Antarjo Dikin MSc.

New Delhi , India – Pada tanggal 31 Agustus hingga 4 September 2009, Badan Karantina Pertanian mengirimkan delegasi untuk mengikuti Sidang 26th Session of The Asia and Pacific Plant Protection Commission (APPPC). Delegasi Indonesia dipimpin langsung oleh Kepala Badan Karantina Pertanian, Ir. Hari Priyono MSi ini terdiri dari : Drs. Suwanda ZA, MSc, Dr. Ir. Antarjo Dikin MSc., Dr. Ir. Hendrajat, Ir. Sukirno MSi dan Ir. Heru Wahyupraja. Sidang di ibukota India, New Delhi dihadiri oleh 16 negara dari 24 negara anggota ditambah observer dari negara Jepang dan lembaga-lembaga Internasional.

Sidang APPC ini merupakan sidang rutin setiap 2 tahunan . Sidang bertujuan untuk pertukaran informasi terkait perlindungan dalam arti luas meliputi perkarantina, IPM, Pestisida dan pengembangan kebijakan regional untuk perlindungan tumbuhan, khususnya perlindungan negara terhadap ancaman South American Leaf Blight pada Tanaman Karet.

Formulasi Perlindungan Tanaman Karet terhadap SALB

Salah satu agenda pada sidang kali ini, secara khusus dibahas mengenai pedoman perlindungan tanaman karet terhadap hama penyakit yang cukup di takuti, SALB. Namun diperlukan revisi pada pedoman ini khususnya artikel 4 Lampiran B karena tidak sesuai dan tanpa dasar kajian analisa resiko. Hal ini



merupakan masukan dari negara Brasil yang didukung oleh negara observer, Jepang.

Dengan beberapa penyempurnaan dalam hal kehati-hatian terutama potensial risiko pada "budded stumps and bud wood" termasuk seedling stumps. Untuk harmonisasi implementasi standard tersebut pada 2 (dua) tahun kedepan akan dibuat SOP termasuk komoditas non-karet sebagai potensial risiko. Kegiatan workshop mendatang akan diselenggarakan di Malaysia dan Indonesia sebagai tuan rumah.

Kedepan, Working Group SALB untuk melakukan pengembangan harmonisasi persyaratan impor terhadap bahan tumbuhan karet serta produk pertanian

lain yang berpotensi penyebaran SALB.

Malaysia ditetapkan sebagai lead country dibantu oleh Indonesia, India, China, Thailand, Vietnam dan Philipina.

Working group ini diharapkan akan menghasilkan output petunjuk teknis untuk kepentingan negara anggota. Workshop direncanakan dilaksanakan pada 2 (dua) tempat yakni Malaysia dan Indonesia dengan pembiayaan di tanggaung sekretariat APPPC.



Selanjutnya pelatihan inspeksi, deteksi, perlakuan terhadap SALB akan dilaksanakan di negara endemis (Brasil). Dan peran aktif dari Indonesia untuk kegiatan workshop dan pelatihan ini sangat diharapkan.

Pertemuan APPPC Kedepan

Sidang di India ini juga disampaikan beberapa laporan negara anggota untuk ditindaklanjuti. Antara lain Australia,

Cambodia, India, Korea, Malaysia, New Zealand, Philipina dan Sri Lanka. Khusus untuk Sri Lanka disampaikan laporan adanya wabah (out break) hama baru yang terjadi di Sri Lanka dan Thailand di tahun 2008, yakni pada pepaya dan ubi kayu. Hama jenis *Paracoccus marginatus* ini kemungkinan sama dengan yang terjadi di Bogor, Indonesia, sehingga di rekomendasikan untuk dilakukan

eradikasi pada daerah-daerah endemis. Selanjutnya sidang menyepakati jadwal Pertemuan APPPC ke-27 tahun 2011 di selenggarakan di Philipina, ke-28 tahun 2013 dan Indonesia pada tahun 2015 yang akan datang. (info selengkapnya : AD/eas)

BIMP-EAGA Workshop : Menyusun SOP Antar Lintas Batas Negara

Oleh : Dr. Ir. Antarjo Dikin, MSc.

Manila – Philipina, Pada tanggal 26 – 29 Mei 2009, Kepala Pusat Karantina Tumbuhan, Drs. Suwanda, ZA, MSc didampingi oleh Dr. Ir. Antarjo, MSc dan Drh. Heriyanto, MM menghadiri Workshop on SOP'S Custom, Immigration, Quarantine, Security – BIM-AEGA di Gedung ADB, Manila.

Pertemuan yang bertujuan untuk membahas rancangan Standard Operational Procedure untuk harmonisasi implementasi MoU Harmonization on CIQS-BIMP EAGA khususnya operasional pengawasan lintas batas Negara yang tergabung dalam BIMP-EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia dan Philipina).

Pihak Asian Development Bank selaku lembaga yang mensponsori kegiatan ini, menyediakan tenaga konsultan selama berlangsungnya workshop ini. Diharapkan kegiatan ini menghasilkan tahapan awal untuk mengetahui

situasi teknis masing-masing pintu p e m a s u k a n , m a m p u mengidentifikasi permasalahan yang disempurnakan dan membangun kerangka harmonisasi dari SOP's lintas antar negara.

Workshop membahas SOP dalam kelompok kerja masing-masing kelompok karantina tumbuhan, karantina ikan dan hewan, imigrasi, keamanan dan kesehatan. Para kelompok kerja membahas tentang standar operasional yang lazim dilaksanakan negara-negara maju, kondisi nyata yang ada di setiap pelabuhan dalam kerangka BIMP-EAGA (Tebedu – Malaysia : Entikong – Indonesia ; Labuan – Malaysia : Muara – Brunie Darrusalam ; Sandakan – Malaysia : Zamboanga, Philipina ; Bitung – Indonesia : General Santoz – Philipina). Workshop selanjutnya membahas kriteria komponen yang diperlukan untuk memperkecil atau

menghilangkan hambatan serta memformulasikan SOP seperti apay yang diperlukan untuk operasionalnya.

Tindak Lanjut

1. Pembahasan SOP sebagai langkah awal untuk harmonisasi kedua negara pada lintas batas terkait fasilitasi perdagangan dan pariwisata melalui bilateral agreement yang spesifik dari masing-masing komponen sangat diperlukan dengan komitmen bersama dari negara anggota.
2. Tiap pelabuhan negara anggota diminta untuk berinisiatif dalam pengembangan pembuatan SOP operasional secara nasional serta meningkatkan kemampuan kerja profesional melalui pelatihan yang dapat dibiayai oleh anggaran masing-masing negara. Sementara ADB akan membiayai hal-hal yang terkait regional.

3. Disarankan dalam membangun kerjasama bilaeral untuk implementasi penerapan SOP harmonisasi BIMP-EAGA pada CIQS perlu pertimbangan untung rugi nilai komersial yang nyata dan aspek bio security negara pada pintu pemasukan. Sebagai contoh misalnya kondisi pintu pemasukan Entikong yang masih sebatas

mobilitas barang-barang untuk keperluan pribadi dengan jumlah terbatas pada masyarakat sekitar lintas batas dan jarang terjadi untuk komersial jumlah besar. Atau untuk pelabuhan Bitung dalam memfasilitas perdagangan dengan General Santoz, Philipina belum terlihat hingga saat ini.

4. Usulan bagi Indonesia, dalam hal ini Badan Karantina Pertanian dapat memulai memformulasi pengembangan format pre-border inspection dengan pihak karantina Tebedu.

Untuk dapat melihat laporan selengkapnya kunjungi : www.karantina.deptan.go.id

SPS-WTO : Implementasi Harmonisasi Regulasi Karantina Indonesia-Jepang

Oleh : Hermansyah, SH, MM, Dr. Ir. Antarjo Dikin MSc.

Pemerintah Jepang akan segera membuat surat jaminan berupa import protocol agar dapat membuka pasaran knenaf Indonesia kenegara sakura ini. Hal ini kedepan diharapkan tidak adanya hambatan dagang dalam rangka implementasi harmonisasi regulasi karantina Jepang.

Jenewa, Swiss – Agenda diatas adalah salah satu pembahasan sidang informal yang dilakukan Indonesia pada pertemuan sidang komite WTO-SPS di Jenewa, Swiss pada tanggal 22 – 24 Juni 2009. Delegasi Indonesia yang diketuai oleh Sekretaris Badan Karantina Pertanian, Hermansyah SH, MM dan anggota yang terdiri dari Dr. Ir. Antarjo Dikin, MSc (Barantan), serta pejabat dari beberapa instansi teknis terkait. Pada sidang kali ini 157 anggota negara berperan serta dengan organisasi dunia lain yang hadir antara lain : IICA, ITC, IPPC, FAO, COPDEX, OIE, ADB, CBC dan beberapa negara non anggota sebagai observer.

Pertemuan informal bilateral Indonesia – Jepang dilakukan karena masih adanya kendala ekspor knenaf Indonesia ke pasar Jepang yang dikarenakan regulasi karantina di negara sakura ini. Dalam dialog sidang serta upaya yang telah dilakukan



Badan Karantina Pertanian dan pihak PT Global Agritek Nusantara (GAN) selaku eksportir, akhirnya pihak Jepang menyatakan kesediaannya untuk menerima produk knenaf Indonesia. Namun demikian pihak Jepang meminta jaminan pihak Indonesia bahwa tidak akan dilakukan ekspor knenaf selain untuk keperluan animal bath.

Pertemuan bilateral lain juga dilakukan antara Indonesia – Meksiko terkait dengan wabah Flu Babi (Swine Flu). Meksiko mengajukan keberatan atas

diberlakukannya Permentan No. 30/2009 mengenai larangan pemasukan babi hidup dan/atau daging babi yang belum di olah beserta turunannya. Larangan yang dikeluarkan Departemen Pertanian selaras dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 16/2009. Menanggapi hal Indonesia menyampaikan bahwa peraturan tersebut merupakan upaya memberikan perlindungan Negara terhadap ancaman penyakit baru yang belum jelas akan status penyebaran penyakit tersebut saat terjadi outbreak

di Meksiko. Kedepan diharapkan ada upaya Meksiko untuk dapat mempresentasi upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi wabah tersebut dan menginformasikannya kepada Indonesia. Sehingga kedepan Badan Karantina Pertanian selaku secretariat national inquiry point dan notifications body dapat memberikan masukan kepada instansi terkait dalam kasus ini. Hal yang sama juga terjadi pada

pertemuan Indonesia dan Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Sidang WTO – SPS merupakan pertemuan rutin yang diselenggarakan oleh sekretariat SPS-WTO dimana setiap tahunnya diselenggarakan 3 (tiga) kali pertemuan dengan tujuan utama untuk mewujudkan harmonisasi perdagangan terkait dengan sanitary dan phytosanitary (SPS). Agenda sidang terdiri dari

pertemuan informal dan informal, dimana masing-masing negara anggota SPS-WTO akan memanfaatkan untuk pertemuan informal bilateral. Dalam pertemuan informal bilateral seperti halnya pertemuan diatas, umumnya membahas substansi terhadap gangguan perdagangan kedua negara terkait dengan kebijakan SPS yang diterapkan. (AD/eas)

Mengunjungi Karantina Pertanian Malaysia

Oleh : Sunan Jaya, SH

Kunjungan ke Stasiun Karantina Hewan dan Tumbuhan Bandara Udara Kuala Lumpur (KLIA) yang merupakan rangkaian acara pada Pertemuan Ke-3 Working Group on Trade Investment (WGTI) - IMT pada tanggal 19 – 20 Agustus 2009 yang lalu.

Kuala Lumpur, Malaysia – Pertemuan dibidang investasi antara 3 negara Indonesia, Malaysia dan Thailand (IMT) kembali digelar setelah pertemuan sebelumnya masing-masing di Palembang, 20 Oktober 2008 dan di Aceh, 26 Juli 2007. Badan Karantina Pertanian mengirimmkan delegasinya yang dipimpin oleh Bapak Sekretaris Badan, Hermansyah SH, MM dan anggota Drh. Sudjarwanto, MM dan Sunanjaya SH.

4 agenda utama pertemuan adalah kesepakatan agenda meeting (annotated agend), business agreement, program report on the implementation of IMT-GT activities, report of MTS Dialogue of The IMT-GT Roadmap for Development. Khusus pada agenda ke-3 cukup mendapat perhatian, dimana hasil tersebut kemudian akan disampaikan pada meeting SOM (Senior Official Meeting) di Putrajaya-Malaysia. Adapun hal pembahasan tersebut



adalah : fasilitas perdagangan dan investasi disepanjang perbatasan IMT, promosi investasi dan perdagangan dan kompilasi serta penyebarluasan informasi kegiatan ekonomi dan bisnis IMT.

Kunjungan ke Karantina Malaysia

Malaysia Agricultural Quarantine Inspections (MALQIS) adalah lembaga perkarantinaan yang sedang dirintis sejak tahun 2008 di Malaysia. Sementara ini Negara Malaysia terkait dengan sistem lembaga perkarantinaan memiliki 2 lembaga yakni : karantina hewan dibawah direktorat jenderal teknis

veterinary dan karantina tumbuhan dibawah direktorat jenderal pertanian dan karantina ikan dibawah direktorat ikan.

Malaysia merupakan salah satu Negara yang sedang berkembang dan mencanangkan menjadi salah satu Negara maju di kawasan Asian Tenggara pada tahun 2020. Untuk itu, maka pembangunan diberbagai bidang terus dirintis baik di bidang pendidikan, infrastruktur, industri maupun pertanian. Pelbagai penelitian yang berkaitan dengan pengolahan dan pengoptimalan produktifitas juga semakin di giatkan.

Terkait dengan pembangunan infrastruktur, Karantina di Malaysia menerapkan pengembangannya yang disesuaikan dengan komoditas yang dilalulintaskannya. Sebagai contoh Stasiun Karantina Padang Besar untuk lembu, kerbau, kuda, domba, kambing, anjing, kucing dan burung, sementara untuk Stasiun Karantina Bayan Lepas terdiri dari kuda, anjing, kucing dan burung.

Lebih Jauh IMT-GT

Tiga negara di kawasan Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia dan Thailand membentuk kerjasama Segita 3 Negara semenjak tahun 1993. IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) memiliki visi untuk menciptakan suatu kawasan tanpa pelapis, progresif, makmur, damai dengan cara meningkatkan kualitas kehidupan.

Pembentukan kerjasama IMT-GT ini akan memberikan kontribusi nyata terhadap realisasi masyarakat ekonomi ASEAN di tahun 2020. Adapun program-program guna pencapaian visi ini adalah mengerahkan adanya akselerasi pertumbuhan ekonomi sektor swasta untuk maju dan membantu fasilitasi dalam pengembangan semua kawasan secara keseluruhan. Tujuan ini dituangkan dalam kerangka kerja (roadmap) pengembangan 2007 – 2017 melalui peningkatan arus perdagangan dan investasi intra dan inter IMT-GT.

Berikut adalah arah strategi roadmap IMT-GT:

- Memfasilitasi dan mempromosikan perdagangan dan investasi intra dan inter IMT-GT.
- Mempromosikan pertumbuhan

sektor pertanian dan agro-industri serta pelancongan.

- Memperkuat hubungan infrastruktur dan mendukung kearah integrasi subkawasan IMT-GT.
- Menekan perhatian terhadap silang sektoral seperti pengembangan SDM, tenaga kerja dan isu-isu lingkungan.
- Memperkuat mekanisme dan pengaturan institusi/kelembagaan untuk mempermudah koordinasi.

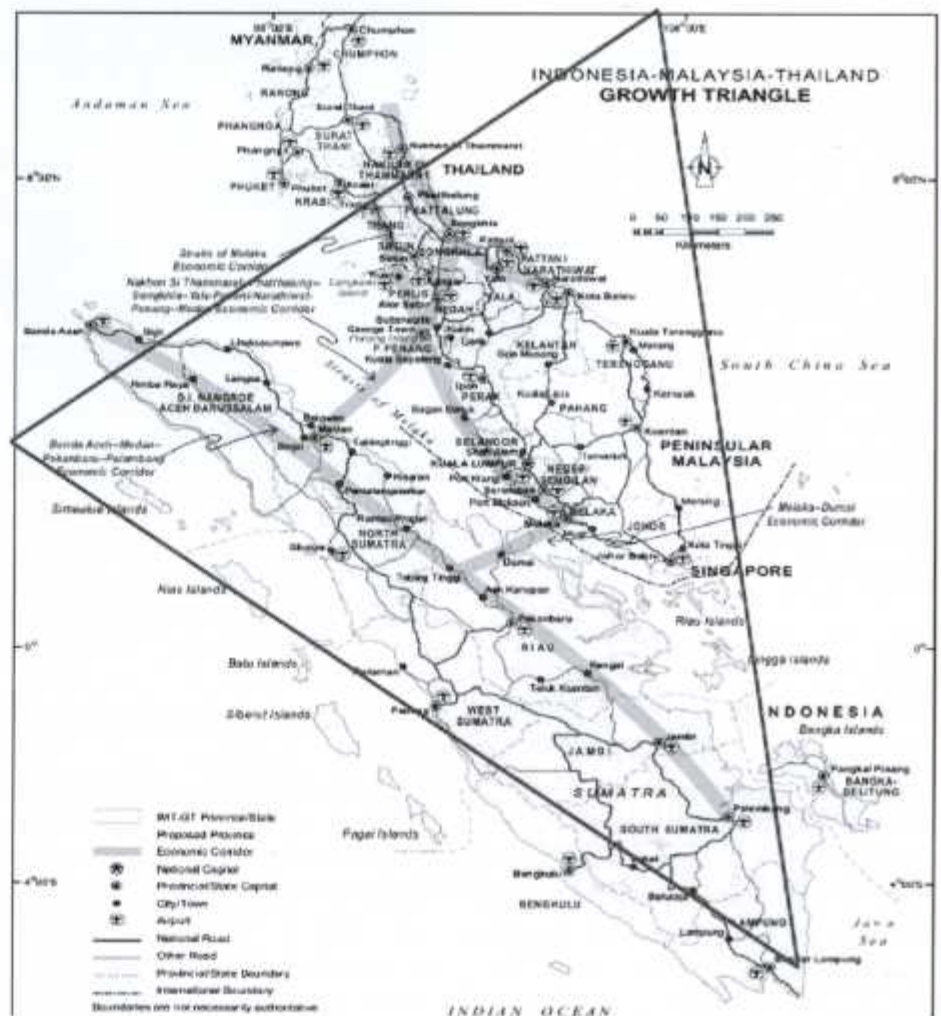
Adapun wilayah yang berada dalam kerangka kerjasama ini adalah :

Indonesia : terdiri dari 10 provinsi yakni Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Kep. Bangka Belitung

Malaysia : terdiri dari 5 negara bagian yakni : Perak, Kedah, Perlis, Selangor, dan Johor Bahru.

Thailand : terdiri atas lima provinsi, yaitu Satun, Songkhla, Yala, Narathiwat, dan Pattani. (SJ/CAS)

MAP of IMT-GT



STOP!

Hama Penyakit Hewan dan Tumbuhan Masuk ke Indonesia

PERIKSAKAN!

DI KARANTINA PERTANIAN



Departemen Pertanian
BADAN KARANTINA PERTANIAN

www.karantina.deptan.go.id

Menulis di

Buletin Media Quaranta



Dapatkan
Souvenir Cantik



Sudah merupakan suatu hal yang wajar kalau setiap naskah yang dimuat buletin ini terlebih dahulu mengalami proses perubahan yang memakan waktu. Untuk lancarnya penyiapan naskah dimaksudkan dan mengurangi kesalahan redaksional, kepada penyumbang naskah dimohon agar memperhatikan dengan cermat pedoman yang diuraikan di bawah ini. Buletin ini merupakan wadah Pejabat Fungsional dan staf teknis lingkup Badan Karantina Pertanian untuk menyalurkan Karya Tulisnya. Diharapkan dengan adanya pedoman ini dapat menjadi petunjuk kepada Pejabat Fungsional di lingkup Badan Karantina Pertanian agar dapat mengembangkan profesinya.

Ruang Lingkup

Buletin Media Quaranta memuat Karya Tulis/Ilmiah/ Makalah berupa tinjauan ilmiah atau ulasan ilmiah dibidang Pertanian, Peternakan, Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengendali HPI, Pengendali OPT tentang hasil penelitian/pengkajian/survey/evaluasi, yang disajikan secara praktis atau ilmiah populer. Buletin ini diterbitkan 2 bulan/sekali.

Bahasa

Buletin ini menggunakan tulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pemakaian istilah yang baru supaya mengikuti pedoman ejaan yang disempurnakan yang berlaku dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Bentuk Naskah

Naskah wajib diketik di atas kertas kwarto putih pada satu permukaan saja, memakai dua spasi. Pinggir kiri dan kanan tulisan disediakan ruang kosong minimal 3,5 cm dari pinggir kertas. Panjang naskah 3 - 5 halaman termasuk tabel, gambar, dan daftar bacaan. Naskah disusun dalam urutan sebagai berikut judul tulisan; nama penulis dan alamatnya; pendahuluan; isi tulisan; penutup serta Daftar Pustaka.

Judul

Judul terdiri dari suatu ungkapan yang dengan tepat mencerminkan isi tulisan. Nama serta instansi tempat kerja penulis dengan alamat yang jelas harus dicantumkan di bawah judul. Bila penulis lebih dari seorang, maka penulisan namanya secara berurutan sesuai dengan kode etik penulisan. Kalau dirasa perlu, judul tulisan masih dapat dilengkapi oleh sub judul untuk mempertegas maksud tulisan.

Teks

Teks terdiri dari pendahuluan, isi karangan, penutup serta daftar bacaan. Satuan ukuran didalam teks dan grafik memakai sistem metrik misalnya dalam satu mikron, mm, cm, km, untuk panjang serta cm³ dan liter untuk volume, hindari memakai satuan pikul, kwintal dan lain sebagainya.

Tabel

Tabel hendaknya diberi judul yang singkat tetapi jelas dengan catatan secukupnya termasuk sumbernya. Tabel diberi nomor urut dengan angka arab.

Gambar dan Grafik

Gambar dan grafik dibuat dengan garis cukup tebal sehingga memungkinkan pencetakan dalam proses mencetak. Keterangan grafik dan gambar janganlah ditulis pada grafik dan gambar itu, melainkan pada selembar kertas sendiri dengan dua spasi. Nama penulis serta nomor gambar harus ditulis dibalik gambar itu disertai sumbernya dengan tulisan pensil lunak. Seperti halnya pada tabel, keterangan yang dimuat pada grafik harus mencukupi agar dapat disajikan secara mandiri.

Potret

Potret adalah satu dari bentuk gambar, karena itu hendaknya dipilih yang mempunyai kontras yang baik dan diberi keterangan gambar.

Surat Menyurat

Naskah dikirim rangkap dua, dialamatkan kepada: Pemimpin Redaksi Buletin Media Quaranta

Gedung E Lt. 1, Departemen Pertanian
Jl. Harsono RM No.3 - Ragunan,
Jakarta 12550

Telp : (021) 7805035 ext 1102,

Fax : (021) 7816481

e-mail : caqsp@indo.net.id

Terima Kasih

Pak Anton ...



Dr. Anton Apriyantono, MSi. telah mengakhiri masa baktinya sebagai Menteri Pertanian RI (2004-2009).

Berikut adalah liputan photo kunjungan Menteri Pertanian bersama Kepala Badan Karantina Pertanian, Ir. Hari Priyono MSi. di pos Lintas Batas Attambua pada medio September 2009

(drh. Devina Indra/Balai Karantina Pertanian Kupang)





Badan Karantina Pertanian
DEPARTEMEN PERTANIAN

Pusat Karantina Tumbuhan

LINDUNGI BUMI **DARI BAHAN FUMIGASI** **PERUSAK OZON**

